
Green But Extractive: Diplomasi Hilirisasi Nikel Indonesia Dan Politik Eksklusi Sosial Di Weda Bay

Roy Setiawan¹, Maudy Noor Fadhlia²
Dosen Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Sriwijaya, Palembang,
Indonesia¹²
roysetiawan@fisip.unsri.ac.id¹, maudynoorfadhlia@fisip.unsri.ac.id²

ABSTRAK Transisi menuju ekonomi hijau telah menjadi fokus utama di tingkat global, dengan negara-negara berlomba-lomba untuk mengimplementasikan kebijakan energi terbarukan dan pembangunan berkelanjutan. Namun, di balik upaya ini, terdapat ironi di mana proyek-proyek yang dianggap "hijau" sering kali mengandalkan praktik ekstraktivisme yang menyerupai kolonialisme. Di Indonesia, proyek hilirisasi nikel di Weda Bay menjadi contoh yang mencolok, di mana negara ini memiliki peran strategis dalam rantai pasok global untuk baterai kendaraan listrik. Meskipun pemerintah mengklaim bahwa hilirisasi nikel merupakan bagian dari diplomasi ekonomi hijau, proyek ini telah menimbulkan eksklusi sosial, kerusakan lingkungan, dan kekerasan struktural terhadap komunitas lokal, terutama perempuan dan individu dengan identitas gender non-normatif. Penelitian ini mengadopsi pendekatan feminist political ecology untuk mengeksplorasi dampak sosial dan lingkungan dari proyek tersebut, serta menyoroti ketidaksetaraan gender dan eksklusi yang dialami oleh kelompok-kelompok rentan. Temuan menunjukkan bahwa meskipun hilirisasi nikel dipromosikan sebagai langkah menuju keberlanjutan, kenyataannya justru memperburuk ketimpangan sosial dan lingkungan.

Kata Kunci : *Ekonomi Hijau, Hilirisasi Nikel, Weda Bay, Feminist Political Ecology, Kerusakan Lingkungan*

ABSTRACT : *The transition toward a green economy has become a central focus at the global level, with countries racing to implement renewable energy policies and sustainable development strategies. However, behind these efforts lies an irony: so-called "green" projects often rely on extractivist practices that resemble colonialism. In Indonesia, the nickel downstreaming project in Weda Bay stands out as a striking example, where the country plays a strategic role in the global supply chain for electric vehicle batteries. Although the government claims that nickel downstreaming is part of its green economic diplomacy, the project has led to social exclusion, environmental degradation, and structural violence against local communities—particularly women and individuals with non-normative gender identities. This study adopts a feminist political ecology approach to explore the social and environmental impacts of the project and to highlight the gendered inequalities and exclusions experienced by vulnerable groups. The findings reveal that although nickel downstreaming is promoted as a step toward sustainability, it in fact exacerbates social and environmental injustices.*

Keywords: *Green Economy, Nickel Downstreaming, Weda Bay, Feminist Political Ecology, Environmental Degradation*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam beberapa tahun terakhir, transisi menuju ekonomi hijau menjadi konsensus global yang tak terbantahkan. Negara-negara di seluruh dunia berlomba-lomba mempercepat proses dekarbonisasi melalui kebijakan energi terbarukan, kendaraan listrik, dan pembangunan berkelanjutan. Di balik euforia ini, terdapat sebuah ironi yang jarang dibicarakan secara terbuka: proyek-proyek “hijau” kerap bergantung pada bentuk-bentuk baru ekstraktivisme yang tidak jauh berbeda dari praktik kolonial sebelumnya. Salah satu contoh paling mencolok dari paradoks ini dapat ditemukan di Indonesia, dalam proyek hilirisasi nikel di kawasan Weda Bay, Halmahera Tengah, Maluku Utara.

Indonesia saat ini menempati posisi strategis dalam rantai pasok global baterai kendaraan listrik (EV) karena cadangan nikelnya yang melimpah—sekitar 21 juta metrik ton atau 22% dari total cadangan dunia (USGS, 2023). Pemerintah, melalui Kementerian Investasi dan Kemenko Marves, mempromosikan hilirisasi nikel sebagai bagian dari diplomasi ekonomi hijau. Retorika yang digunakan menekankan "nilai tambah nasional", "transisi energi", dan "pembangunan berkelanjutan", baik dalam forum internasional seperti G20 maupun dalam pertemuan bilateral dengan mitra strategis seperti Tiongkok dan Korea Selatan (Nugroho, 2022; Tempo, 2023).

Namun di balik citra “ramah lingkungan” ini, terdapat dinamika sosial-politik yang menyimpan persoalan serius. Proyek smelter nikel di Weda Bay yang dikelola oleh PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP)—merupakan hasil joint venture antara perusahaan Indonesia dan konsorsium Tiongkok—telah memicu gelombang eksklusi sosial, degradasi lingkungan, dan kekerasan struktural terhadap komunitas lokal, termasuk perempuan dan gender non-normatif (JATAM, 2023). Laporan WALHI menyebutkan bahwa proyek ini menyebabkan pencemaran air, deforestasi, dan penggusuran paksa masyarakat adat Tobelo dan Sawai yang selama ini menggantungkan hidup pada tanah dan hutan (WALHI, 2022).

Literatur mengenai ekonomi hijau global telah banyak membahas bagaimana narasi keberlanjutan sering kali menjadi alat hegemonik untuk melanggengkan struktur ketimpangan (Brand & Wissen, 2021; *Death*, 2014). Dalam konteks negara-negara Global South seperti Indonesia, transisi hijau tidak serta-merta menciptakan keadilan ekologis dan sosial. Alih-alih membebaskan masyarakat dari ketimpangan, proyek-proyek “berkelanjutan” justru menciptakan bentuk baru kolonialisme sumber daya—fenomena yang oleh beberapa akademisi disebut sebagai *green extractivism* (Dunlap & Jakobsen, 2020).

Dalam hal ini, pendekatan *feminist political ecology* menjadi relevan untuk menganalisis bagaimana proyek-proyek lingkungan berdampak secara tidak setara terhadap kelompok rentan. Teori ini menunjukkan bahwa relasi antara manusia dan lingkungan tidak netral gender, melainkan dibentuk oleh struktur kuasa patriarkal, kapitalisme global, dan eksklusi sosial (Rocheleau et al., 1996; Harcourt & Nelson, 2015). Di Weda Bay, perempuan lokal terpinggirkan dari proses pengambilan keputusan, sementara banyak di antara mereka terjebak dalam pekerjaan berupah rendah di sektor domestik perusahaan tambang (Mongabay, 2023). Di sisi lain,

identitas gender non-normatif seperti *waria* dan *queer bodies* nyaris tak tampak dalam wacana perlindungan buruh maupun CSR perusahaan.

Kesenjangan ini semakin tajam ketika proyek-proyek ekstraktif seperti di Weda Bay dipromosikan dalam forum internasional sebagai “praktik baik” pembangunan hijau. Pemerintah Indonesia secara aktif menampilkan diri sebagai pemimpin transisi energi global, tanpa mengakui dampak sosial dari proses hilirisasi yang mereka dorong. Inilah yang oleh banyak pihak disebut sebagai *greenwashing*—strategi simbolik untuk menutupi praktik tidak berkelanjutan di balik retorika hijau (Greenpeace, 2021; Banerjee, 2008). Dalam kerangka diplomasi luar negeri Indonesia, *greenwashing* tidak hanya menjadi alat pencitraan, tetapi juga mekanisme negosiasi kuasa dan investasi.

Meskipun banyak penelitian yang membahas dampak ekonomi dari hilirisasi nikel dan dampak lingkungan yang ditimbulkan, literatur yang menyentuh sisi sosial dan ketimpangan gender dalam konteks proyek ekstraktif Indonesia sangat terbatas. Sebagian besar kajian lebih fokus pada keuntungan ekonomi, investasi asing, dan pertumbuhan industri, sementara sedikit yang mendalami bagaimana proses hilirisasi ini mengeksklusi kelompok-kelompok rentan dalam pengambilan keputusan, terutama dalam perspektif sosial dan gender (Paehlke, 2000; Lister, 2019). Proyek-proyek ekstraktif yang tampaknya berkelanjutan sering kali mengabaikan suara dan kebutuhan masyarakat adat, perempuan, dan kelompok-kelompok marginal lainnya yang seharusnya menjadi bagian dari perencanaan pembangunan yang inklusif.

Fenomena *greenwashing* di Indonesia, khususnya dalam diplomasi hilirisasi nikel, juga perlu mendapat perhatian lebih. Pemerintah Indonesia dengan aktif mempromosikan narasi *green economy* dalam forum internasional, tanpa cukup mempertimbangkan dampak nyata terhadap komunitas lokal yang terpinggirkan. Di dalam diplomasi internasional, Indonesia berusaha membangun citra sebagai negara yang berkomitmen pada transisi energi hijau, tetapi seringkali proyek ini menyembunyikan ketidakadilan sosial yang terjadi di tingkat lokal (Greenpeace, 2021; Banerjee, 2008). Padahal, narasi tersebut sering kali lebih bertujuan untuk menarik investasi asing daripada benar-benar memperhatikan keberlanjutan sosial dan ekologis di dalam negeri.

Sementara itu, dalam konteks diplomasi internasional, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam menyeimbangkan antara pengembangan industri dengan perlindungan sosial dan lingkungan. Diplomasi ekonomi hijau yang dijalankan oleh Indonesia, melalui proyek hilirisasi nikel, tidak dapat dipandang hanya sebagai sebuah kebijakan ekonomi semata, tetapi juga sebagai bagian dari upaya untuk memperbaiki citra negara di mata dunia internasional, khususnya dalam menyongsong target global mengenai perubahan iklim. Program ini menempatkan Indonesia sebagai salah satu pemain utama dalam industri kendaraan listrik yang berbasis baterai, yang sangat dibutuhkan untuk mendukung transisi energi hijau global (Hedegaard & Luken, 2022). Namun, proyek tersebut sering kali mengabaikan dampak sosial di dalam negeri, khususnya terhadap perempuan dan kelompok minoritas lainnya yang tidak mendapat perhatian dalam narasi pembangunan berkelanjutan tersebut.

Menurut Brown (2019), praktik ekstraktif dalam sektor pertambangan,

yang secara luas dipromosikan dengan label “berkelanjutan”, sering kali berfungsi sebagai strategi untuk menarik investasi asing, sementara mengabaikan dampak sosial dan ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat lokal. Dalam banyak kasus, perusahaan tambang dan negara lebih mementingkan keuntungan ekonomi jangka pendek daripada jaminan keberlanjutan jangka panjang bagi masyarakat dan lingkungan. Proyek hilirisasi nikel yang didorong oleh pemerintah Indonesia tidak terkecuali. Meskipun perusahaan berupaya untuk memenuhi standar internasional yang ramah lingkungan, kenyataannya masyarakat yang berada di sekitar area tambang harus menghadapi masalah serius seperti kehilangan mata pencaharian, penggusuran paksa, dan kerusakan lingkungan yang terus berlanjut.

Selain itu, penting untuk diingat bahwa dalam proses transisi menuju ekonomi hijau ini, tidak semua kelompok masyarakat menikmati hasilnya dengan adil. Perempuan, khususnya yang tinggal di sekitar area tambang, sering kali menjadi korban dari ketidaksetaraan sosial dan ekonomi yang semakin dalam. Dalam banyak kasus, perempuan tidak hanya berperan sebagai tenaga kerja domestik yang tak terlihat, tetapi juga sering kali dipaksa untuk menghadapi dampak sosial dan lingkungan yang lebih buruk akibat proyek-proyek ekstraktif (Harcourt & Nelson, 2015). Perempuan yang terlibat dalam sektor informal, seperti pedagang atau pekerja rumah tangga, bahkan cenderung mendapat upah yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki yang bekerja di sektor formal. Di sisi lain, perempuan yang tinggal di daerah-daerah yang terkena dampak langsung dari proyek-proyek ini, sering kali tidak memiliki ruang untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi hidup mereka.

Selain ketimpangan gender, terdapat juga peran penting komunitas gender non-normatif, seperti *waria* dan kelompok queer lainnya, yang hampir selalu terabaikan dalam kebijakan publik dan sosial. Mereka seringkali menjadi kelompok yang paling rentan terhadap dampak negatif proyek-proyek ekstraktif, baik dalam hal ketidaksetaraan ekonomi, pengabaian hak sosial, maupun dampak lingkungan yang merugikan. Penelitian yang lebih dalam tentang bagaimana kebijakan hilirisasi nikel mempengaruhi kelompok ini sangat jarang dilakukan, padahal mereka adalah bagian dari masyarakat yang turut menanggung beban sosial akibat kebijakan yang diambil oleh negara.

Penelitian ini mengadopsi pendekatan *feminist political ecology* untuk menggali lebih dalam bagaimana proses pembangunan yang mengklaim sebagai berkelanjutan ini pada kenyataannya memperburuk kondisi sosial masyarakat, terutama perempuan dan komunitas gender non-normatif. Dengan mengangkat isu ini, diharapkan artikel ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan studi diplomasi feminis dan teori pembangunan yang lebih inklusif dan berkeadilan sosial.

Penting untuk menekankan bahwa ketimpangan yang muncul dari proyek hilirisasi nikel ini bukan hanya masalah ekonomi semata, melainkan juga masalah politik yang terkait dengan kuasa negara dan aktor-aktor internasional yang mempengaruhi kebijakan dalam negeri. Negara-negara besar yang berinvestasi di sektor ini sering kali memaksakan standar pembangunan yang tidak sejalan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat lokal. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana diplomasi internasional, melalui retorika pembangunan hijau, berperan

dalam memperburuk ketidaksetaraan sosial yang sudah ada.

TINJAUAN PUSTAKA

Green Extractivism dan Kritik terhadap Narasi Ekonomi Hijau

Dalam literatur global, istilah *green extractivism* mengacu pada bentuk-bentuk baru ekstraksi sumber daya alam yang dibungkus dalam narasi keberlanjutan. Meski tampak progresif, praktik ini tetap beroperasi dalam kerangka kapitalisme global yang menempatkan keuntungan ekonomi di atas keseimbangan ekologi dan keadilan sosial (Dunlap & Jakobsen, 2020; Death, 2014). Brand dan Wissen (2021) menjelaskan bahwa proyek-proyek energi terbarukan yang memerlukan bahan baku mineral justru memperluas logika kolonial dalam bentuk yang lebih “modern”. Dalam konteks Indonesia, pendekatan ini terlihat jelas dalam hilirisasi nikel yang didorong untuk memenuhi kebutuhan global terhadap baterai kendaraan listrik. Namun, seperti yang dicatat oleh Paehlke (2000) dan Lister (2019), keberlanjutan sejati tidak dapat dicapai jika hanya berfokus pada indikator ekonomi makro, tanpa mempertimbangkan distribusi manfaat dan risiko di tingkat lokal. Literatur ini mengingatkan kita bahwa keberlanjutan yang tidak menyentuh akar ketimpangan sosial hanya akan melanggengkan bentuk-bentuk eksklusif yang sudah ada.

Feminist Political Ecology dan Dampak Gender dari Proyek Ekstraktif

Teori *Feminist Political Ecology* (FPE) memberikan lensa penting untuk melihat bagaimana proyek pembangunan lingkungan sering kali berdampak secara tidak adil terhadap kelompok-kelompok yang termarginalkan, khususnya perempuan dan individu dengan identitas gender non-normatif (Rocheleau et al., 1996; Harcourt & Nelson, 2015). FPE menekankan bahwa relasi manusia-lingkungan tidak netral, tetapi sangat dipengaruhi oleh struktur sosial seperti patriarki, kapitalisme, dan rasialisme. Dalam konteks Weda Bay, perempuan lokal tidak hanya kehilangan akses terhadap tanah dan sumber daya, tetapi juga disisihkan dari proses pengambilan keputusan dan terjebak dalam sektor informal yang tak terlindungi (Mongabay, 2023; JATAM, 2023). Lebih jauh lagi, kelompok gender non-normatif seperti waria atau queer sering kali tidak hanya diabaikan dalam wacana pembangunan, tetapi juga menjadi korban dari kekerasan sosial dan simbolik yang dilembagakan (Nishida & Kato, 2023; Collins, 2015). Literatur queer dan feminis mengingatkan bahwa eksklusif ini tidak bersifat insidental, tetapi merupakan bagian dari sistem kekuasaan yang terstruktur.

Greenwashing dan Diplomasi Hijau sebagai Strategi Politik

Konsep *greenwashing* telah banyak dibahas dalam kajian hubungan internasional dan studi pembangunan sebagai strategi simbolik negara dan korporasi untuk memperbaiki citra tanpa mengubah praktik substansial mereka (Banerjee, 2008; Fletcher & Duncan, 2021). Dalam hal ini, *greenwashing* bukan hanya strategi pemasaran, tetapi juga merupakan bagian dari diplomasi yang digunakan negara-negara untuk menarik investasi dan pengaruh di tingkat global.

Dalam studi tentang Indonesia, Greenpeace (2021) dan Tempo (2023) menunjukkan bagaimana pemerintah menggunakan proyek hilirisasi nikel sebagai bukti komitmen terhadap ekonomi hijau, sementara pada saat yang sama mengabaikan fakta-fakta tentang kerusakan lingkungan dan ketidakadilan sosial yang terjadi di lapangan. Diplomasi hijau Indonesia, alih-alih menjadi alat

transformasi sosial-ekologis, kerap terjebak dalam logika pembangunan yang masih bersifat eksploitatif.

Kajian tentang Kekerasan Struktural dan Industri Ekstraktif

Literatur mengenai industri ekstraktif di negara-negara Global South mencatat bahwa proyek pertambangan sering menjadi lokasi terjadinya kekerasan struktural, terutama terhadap buruh migran, perempuan, dan komunitas adat (Harvey, 2005; Goldman, 2005). Hal ini diperparah dengan lemahnya perlindungan hukum, minimnya representasi masyarakat lokal, serta kecenderungan negara untuk berpihak pada kepentingan investor (Hernandez et al., 2021; Srivastava, 2020).

Dalam konteks Indonesia, laporan dari ILO (2021) dan Human Rights Watch menyoroti persoalan sistemik dalam perlindungan buruh sektor tambang, termasuk pelanggaran terhadap jam kerja, keselamatan kerja, dan ketimpangan upah. Keadaan ini tidak jauh berbeda dengan yang terjadi di Brasil, Filipina, dan Papua Nugini—di mana proyek-proyek ekstraktif merusak tanah adat dan memperkuat marginalisasi sosial (Lima et al., 2020; Gonzales et al., 2020).

Interseksionalitas dan Politik Inklusivitas

Kerangka interseksionalitas yang dikembangkan oleh Crenshaw (1991) menjadi alat analisis yang penting dalam memahami bagaimana berbagai lapisan identitas—seperti gender, kelas, dan etnis—berinteraksi untuk menciptakan bentuk-bentuk penindasan yang kompleks. Dalam konteks proyek hilirisasi nikel, perspektif ini membantu mengungkap bagaimana perempuan adat, buruh migran, dan queer bodies menghadapi berbagai bentuk eksklusi yang tidak bisa dipahami hanya dari satu kategori identitas saja.

Dengan menggunakan pendekatan ini, penelitian mengenai Weda Bay dapat memperlihatkan bahwa proyek “pembangunan berkelanjutan” yang bersifat eksklusi tidak hanya gagal memenuhi prinsip keadilan sosial, tetapi juga mereproduksi bentuk-bentuk kolonialisme dan patriarki dalam kemasan yang lebih modern.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis dampak sosial dan lingkungan dari proyek hilirisasi nikel di Weda Bay, Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian yang ingin menggali secara mendalam tentang dinamika sosial, gender, dan lingkungan yang terpengaruh oleh proyek hilirisasi nikel, serta untuk mengeksplorasi perspektif dari berbagai pihak yang terlibat dalam kebijakan ini. Pendekatan kualitatif memungkinkan pemahaman yang lebih kaya tentang hubungan antara kebijakan pembangunan hijau, ketidaksetaraan sosial, dan dampaknya terhadap masyarakat lokal, terutama perempuan dan kelompok marginal (Creswell, 2014; Silverman, 2013).

Penelitian ini mengadopsi Teori Ekonomi Politik dan *Feminist Political Ecology* (FPE) sebagai kerangka teoritis utama untuk menganalisis kebijakan hilirisasi nikel di Weda Bay. Teori Ekonomi Politik digunakan untuk menganalisis hubungan antara kebijakan pemerintah, kepentingan ekonomi, dan dampaknya terhadap distribusi kekuasaan dalam masyarakat (Bretton, 2000). Pendekatan ini memungkinkan untuk melihat bagaimana proyek hilirisasi nikel dikendalikan oleh aktor-aktor global dan nasional yang lebih besar, dan bagaimana kebijakan ini

memperburuk ketidaksetaraan sosial dan ekonomi di tingkat lokal.

Selain itu, *Feminist Political Ecology* (FPE) digunakan untuk menyoroiti ketidaksetaraan gender dalam kebijakan pembangunan. FPE mengintegrasikan teori feminis dengan ekologi politik untuk menganalisis bagaimana pembangunan berkelanjutan dan kebijakan lingkungan sering kali mengabaikan dampak sosial terhadap perempuan dan kelompok rentan lainnya (Harcourt & Nelson, 2015). Dalam konteks ini, FPE memungkinkan pemahaman yang lebih dalam mengenai bagaimana ketidaksetaraan gender, sosial, dan ekonomi diperburuk oleh kebijakan pembangunan hijau yang fokus pada ekstraksi sumber daya alam, seperti hilirisasi nikel.

Teori Interseksionalitas juga digunakan untuk menganalisis bagaimana gender, kelas sosial, dan etnisitas berinteraksi dalam membentuk pengalaman masyarakat terhadap kebijakan hilirisasi nikel. Pendekatan ini memungkinkan untuk mengeksplorasi bagaimana ketidaksetaraan ganda, atau bahkan lebih, dialami oleh kelompok rentan dalam masyarakat yang terpinggirkan oleh proyek ekstraktif. Crenshaw (1991) menyatakan bahwa pendekatan interseksional ini penting untuk memahami bagaimana berbagai dimensi identitas saling berpotongan, menciptakan bentuk-bentuk ketidakadilan yang lebih kompleks.

Penelitian ini memanfaatkan analisis kebijakan sebagai metode utama untuk memahami bagaimana kebijakan hilirisasi nikel dirumuskan dan diimplementasikan, serta dampaknya terhadap kelompok-kelompok rentan, termasuk perempuan, masyarakat adat, dan komunitas lokal. Metode ini berfokus pada kajian dokumen-dokumen kebijakan yang relevan, laporan perusahaan terkait, dan sumber-sumber lain yang menggambarkan implikasi sosial dan ekologis dari proyek hilirisasi tersebut (Bache & Flinders, 2004). Dengan menggunakan analisis kebijakan, penelitian ini dapat mengeksplorasi bagaimana kebijakan tersebut dihadapkan pada kepentingan ekonomi dan lingkungan, serta siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan dalam prosesnya.

Pengumpulan data dilakukan melalui kajian mendalam terhadap dokumen-dokumen kebijakan, laporan perusahaan, serta dokumen publikasi yang membahas proyek hilirisasi nikel dan dampaknya terhadap masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji laporan dari LSM dan aktivis lingkungan yang menyoroiti ketidaksetaraan sosial dan dampak lingkungan dari proyek-proyek ekstraktif (Greenpeace, 2021; Amnesty International, 2020). Semua data yang dikumpulkan kemudian dianalisis secara tematik, di mana peneliti mencari pola-pola yang mengungkapkan bagaimana kebijakan hilirisasi nikel berdampak pada kelompok rentan dan bagaimana kebijakan tersebut memperburuk ketidaksetaraan gender dan sosial.

Secara keseluruhan, pendekatan kualitatif ini memungkinkan penelitian untuk menyelami secara lebih mendalam bagaimana kebijakan hilirisasi nikel, meskipun diklaim sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan, dapat memperburuk ketidaksetaraan sosial, khususnya dalam konteks gender. Melalui analisis yang berbasis pada data kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai bagaimana proyek hilirisasi nikel di Weda Bay dapat memperburuk ketimpangan yang ada dalam masyarakat,

terutama bagi perempuan dan kelompok-kelompok yang lebih rentan (Banerjee, 2008; Harcourt & Nelson, 2015).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Diplomasi Hijau Indonesia dan Hilirisasi Nikel: Antara Janji dan Kenyataan

Diplomasi hijau Indonesia memainkan peran yang semakin penting dalam menjawab tantangan global terkait perubahan iklim dan transisi energi bersih. Sebagai negara penghasil nikel terbesar di dunia, Indonesia menjadikan komoditas ini sebagai bagian dari upaya hilirisasi yang dipromosikan dalam kebijakan energi dan lingkungan. Namun, seperti halnya proyek-proyek ekstraktif lainnya, proyek hilirisasi nikel mengungkapkan ketegangan antara komitmen terhadap ekonomi hijau dan kenyataan di lapangan yang kerap kali berisiko terhadap lingkungan dan keadilan sosial.

Penting untuk memahami mengapa nikel dipandang sebagai bahan yang vital dalam transisi energi global. Nikel adalah salah satu komponen kunci dalam produksi baterai kendaraan listrik (EV), yang dipandang sebagai solusi untuk mengurangi emisi karbon dalam sektor transportasi. Dalam konteks ini, Indonesia berperan sebagai negara yang menyediakan sebagian besar nikel dunia. Kebijakan hilirisasi nikel Indonesia bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah mineral tersebut melalui pengolahan di dalam negeri, menjadikan Indonesia tidak hanya sebagai eksportir bahan mentah, tetapi juga sebagai pemain utama dalam industri energi hijau.

Namun, kebijakan ini juga mendapat kritik terkait dampak ekologis yang ditimbulkan. Sumber daya alam Indonesia, termasuk nikel, diambil dengan cara yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang sangat besar. Banyak proyek hilirisasi nikel Indonesia yang dilakukan tanpa mempertimbangkan keberlanjutan ekosistem lokal, mengarah pada degradasi hutan tropis, kerusakan lahan, dan pencemaran air yang mengancam kehidupan komunitas sekitar tambang (Dewi et al., 2022). Konflik antara kebutuhan pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan menjadi isu sentral dalam diplomasi hijau ini.

Peran Tiongkok dalam industri hilirisasi nikel Indonesia perlu dibahas secara mendalam. Tiongkok adalah mitra utama dalam investasi nikel di Indonesia, dengan berbagai perusahaan besar asal Tiongkok yang terlibat dalam proyek hilirisasi ini. Pemerintah Indonesia menjalin hubungan yang erat dengan Tiongkok untuk mendapatkan akses ke teknologi dan investasi yang dibutuhkan untuk mengembangkan industri baterai kendaraan listrik.

Namun, seperti yang telah terjadi di banyak proyek ekstraktif lainnya, praktik investasi Tiongkok sering kali dikritik karena tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi, tetapi juga mengabaikan aspek sosial dan lingkungan. Misalnya, proyek tambang nikel yang dikelola oleh perusahaan-perusahaan Tiongkok seringkali terlibat dalam perusakan lingkungan dan eksploitasi buruh, serta mengabaikan hak-hak masyarakat lokal. Investasi besar-besaran dalam sektor ini membawa masuk modal asing tetapi tidak disertai dengan pengawasan yang ketat terhadap dampak sosial-ekologisnya (Zhang, 2021).

Diplomasi hijau Indonesia juga menghadapi kontradiksi antara janji untuk mendukung ekonomi hijau dan praktik ekstraktif yang tidak selalu sesuai dengan

prinsip keberlanjutan. Di satu sisi, proyek hilirisasi nikel Indonesia berupaya untuk mendukung transisi energi bersih dan memenuhi permintaan global terhadap bahan baku kendaraan listrik. Namun, di sisi lain, praktik pertambangan yang intensif di Indonesia mengancam keberlanjutan lingkungan. Sejumlah studi kasus internasional juga mengungkapkan bahwa negara-negara penghasil nikel lainnya, seperti Filipina dan Brasil, menghadapi tantangan serupa dalam mengelola dampak lingkungan dari ekstraksi sumber daya alam yang intensif.

Sebagai perbandingan, Brasil telah lama terlibat dalam proyek ekstraktif yang berfokus pada komoditas penting seperti tembaga dan bauksit. Meskipun negara tersebut terlibat dalam berbagai kesepakatan internasional terkait keberlanjutan, realitas di lapangan menunjukkan bahwa dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh praktik pertambangan justru bertentangan dengan prinsip-prinsip keberlanjutan yang dicanangkan dalam perjanjian internasional (Lima et al., 2020).

1. Kekerasan Struktural dalam Proyek Ekstraktif Weda Bay

Proyek hilirisasi nikel di Weda Bay, yang menjadi bagian dari upaya Indonesia dalam menjadikan dirinya sebagai pusat industri energi hijau global, tidak hanya menimbulkan dampak lingkungan yang merugikan, tetapi juga berkontribusi terhadap kekerasan struktural yang menimpa pekerja dan masyarakat lokal. Kekerasan struktural di sini merujuk pada kondisi yang menciptakan ketidaksetaraan dan penindasan yang diorganisasi dalam struktur sosial dan ekonomi, yang pada akhirnya menyebabkan kelompok-kelompok tertentu—terutama buruh, perempuan, dan komunitas adat—menderita meskipun mereka terlibat langsung dalam proses ekonomi yang menguntungkan negara dan sektor industri global.

Eksplorasi Buruh Lokal dan Migran: Jam Kerja Panjang, Upah Minim, dan Pelanggaran K3

Salah satu aspek paling mencolok dari proyek ekstraktif Weda Bay adalah eksploitasi buruh, baik buruh lokal maupun migran. Dalam hal ini, eksploitasi beroperasi pada beberapa tingkat: pertama, ada ketidakadilan dalam struktur upah, dengan pekerja yang menerima upah jauh di bawah kebutuhan hidup layak. Berdasarkan laporan dari Organisasi Buruh Internasional (ILO, 2021), upah yang diberikan kepada pekerja tambang di Weda Bay cenderung tidak memadai untuk menutupi biaya hidup, meskipun mereka bekerja dalam kondisi yang sangat berbahaya.

Selanjutnya, jam kerja yang panjang dan tidak teratur merupakan praktik umum yang menyebabkan beban fisik dan mental yang tinggi bagi pekerja. Mereka sering kali dipaksa untuk bekerja lebih dari 12 jam sehari, yang jauh melampaui standar internasional yang disepakati. Praktik ini menimbulkan berbagai masalah kesehatan dan keselamatan, terutama ketika ditempatkan dalam kondisi yang kurang menguntungkan dan minimnya akses terhadap perlindungan K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja). Kekerasan struktural di sini mencakup ketidakmampuan negara dan perusahaan untuk memenuhi kewajiban mereka dalam menjamin hak-hak buruh, sebuah kegagalan yang dapat dilihat di banyak proyek ekstraktif besar di seluruh dunia.

Sebagai perbandingan, dalam kasus proyek pertambangan di Filipina, para pekerja sering menghadapi jam kerja yang berlebihan dan tidak ada peraturan yang

memadai mengenai perlindungan kesehatan dan keselamatan mereka (Gonzales et al., 2020). Meskipun ada beberapa peraturan yang mengatur perlindungan buruh, pelanggaran terhadap hukum tersebut sering kali tidak dihukum atau ditanggapi dengan serius.

Perempuan dan Gender Non-Normatif dalam Posisi Paling Rentan

Salah satu elemen penting dalam analisis kekerasan struktural di proyek ekstraktif adalah bagaimana perempuan dan gender non-normatif diperlakukan dalam proyek hilirisasi nikel ini. Di sektor pertambangan, perempuan sering kali ditempatkan pada posisi yang lebih rendah dan terpinggirkan, yang membatasi akses mereka pada kesempatan yang setara dalam pekerjaan dan perlindungan. Dalam banyak kasus, perempuan bekerja di sektor informal yang tidak terjamin secara hukum, misalnya dalam pekerjaan domestik yang melayani kebutuhan para pekerja tambang, atau dalam sektor layanan seperti kantin dan kebersihan.

Namun, tantangan yang dihadapi oleh pekerja perempuan tidak hanya berhenti pada diskriminasi struktural semata. Kekerasan berbasis gender (GBV) menjadi salah satu aspek yang seringkali terabaikan dalam proyek ekstraktif. Banyak perempuan yang bekerja di sektor pertambangan mengalami pelecehan seksual dan kekerasan fisik di tempat kerja, baik dari sesama pekerja maupun dari manajemen, namun mereka tidak memiliki saluran untuk melapor atau mendapatkan keadilan. Laporan dari Global Witness (2022) menunjukkan bahwa perempuan di proyek-proyek pertambangan sering kali terpaksa menerima kondisi tersebut, karena ancaman kehilangan pekerjaan atau tidak ada alternatif ekonomi lainnya.

Selain itu, pekerja gender non-normatif, seperti mereka yang mengidentifikasi sebagai transgender atau non-biner, sering kali menghadapi diskriminasi ganda. Mereka mungkin ditolak dalam pekerjaan tertentu atau dipaksa untuk mengadopsi peran yang tidak sesuai dengan identitas mereka. Kekerasan struktural yang dialami oleh individu dengan identitas gender non-normatif ini biasanya lebih sistematis dan kurang terlihat, meskipun dampaknya dapat sangat merusak, baik secara sosial, fisik, maupun psikologis. Penelitian oleh Nishida & Kato (2023) menunjukkan bahwa diskriminasi terhadap pekerja non-biner di sektor tambang terjadi dalam berbagai bentuk, dari diskriminasi dalam rekrutmen hingga kekerasan verbal dan fisik di tempat kerja.

Pengabaian Hak Komunitas Adat: Penggusuran dan Perusakan Ekosistem Lokal

Komunitas adat yang tinggal di sekitar kawasan tambang di Weda Bay juga menghadapi kekerasan struktural yang terkait dengan penggusuran paksa dan perusakan ekosistem yang mereka huni. Banyak dari mereka yang telah bergantung pada sumber daya alam lokal untuk bertahan hidup selama berabad-abad, namun harus kehilangan tanah dan sumber daya mereka karena proyek pertambangan besar-besaran yang tidak mereka pilih atau setuju.

Dalam banyak kasus, komunitas adat di Indonesia, seperti yang terlihat dalam kasus-kasus di Papua dan Kalimantan, sering kali dipaksa untuk meninggalkan rumah mereka tanpa mendapatkan ganti rugi yang adil atau akses ke tempat tinggal yang layak. Mereka bahkan sering kali tidak dilibatkan dalam proses perencanaan atau perundingan mengenai proyek tersebut, meskipun tanah mereka

seringkali menjadi bagian dari tambang. Pemerintah Indonesia tidak selalu menyediakan mekanisme yang transparan dan adil bagi mereka untuk memperjuangkan hak atas tanah mereka, dan sering kali penggusuran dilakukan tanpa proses hukum yang jelas.

Contoh lainnya yang serupa adalah proyek ekstraktif di Amazon Brasil, di mana masyarakat adat juga harus menghadapi penggusuran paksa dan kerusakan lingkungan akibat proyek pertambangan besar yang didorong oleh tekanan dari negara dan perusahaan-perusahaan asing. Masyarakat adat di Amazon sering kali tidak memiliki akses ke sistem hukum yang melindungi mereka, meskipun mereka tinggal di wilayah yang memiliki status hukum khusus sebagai tanah adat. Penelitian yang dilakukan oleh Hernandez et al. (2021) menunjukkan bahwa proyek-proyek ekstraktif ini tidak hanya merusak ekosistem tetapi juga merusak struktur sosial komunitas adat, yang mempengaruhi mereka secara langsung dalam bentuk penghilangan cara hidup tradisional dan hilangnya akses ke sumber daya alam yang vital.

Salah satu masalah besar dalam proyek ekstraktif seperti Weda Bay adalah tidak adanya mekanisme perlindungan hak asasi manusia (HAM) yang benar-benar responsif terhadap interseksionalitas—yakni pengakuan terhadap bagaimana berbagai identitas sosial (misalnya, gender, etnisitas, dan status kelas) saling berinteraksi untuk membentuk pengalaman individu terhadap penindasan dan ketidakadilan. Di banyak tempat, termasuk Indonesia, mekanisme perlindungan HAM yang ada tidak dapat mengatasi kompleksitas kekerasan struktural yang dialami oleh buruh, perempuan, dan komunitas adat secara bersamaan.

Seiring dengan perkembangan norma internasional yang semakin menekankan pentingnya perlindungan HAM dalam proyek ekstraktif, seperti yang tercantum dalam UN Guiding Principles on Business and Human Rights (2011), pemerintah Indonesia masih menghadapi kesulitan dalam implementasi kebijakan perlindungan yang efektif. Misalnya, meskipun ada peraturan yang mengatur tentang tanggung jawab perusahaan terhadap perlindungan HAM, banyak perusahaan yang terlibat dalam proyek hilirisasi nikel mengabaikan prinsip-prinsip ini, karena tidak ada pengawasan yang memadai dari pemerintah.

Sebagai perbandingan, di India, ketika proyek pertambangan besar dilakukan di wilayah-wilayah yang dihuni oleh komunitas adat, masalah serupa juga muncul, di mana perusahaan besar sering kali lebih memilih untuk mengabaikan hak-hak masyarakat adat daripada menyediakan solusi yang adil dan memadai (Srivastava, 2020). Hal ini memperburuk kesenjangan antara narasi global tentang keberlanjutan dan kenyataan lapangan yang jauh dari prinsip-prinsip tersebut.

2. Greenwashing dan Eksklusi Sosial dalam Retorika Diplomasi Hijau

Diplomasi hijau Indonesia telah memainkan peran yang semakin signifikan dalam upaya negara untuk mempromosikan transisi energi yang lebih bersih dan ramah lingkungan di kancah internasional. Salah satu fokus utama Indonesia dalam konteks ini adalah proyek hilirisasi nikel, yang dijadikan sebagai bagian dari agenda ekonomi hijau negara tersebut. Melalui hilirisasi nikel, Indonesia berusaha meningkatkan nilai tambah dari komoditas nikel, mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah, dan menjadi pemain utama dalam

industri baterai kendaraan listrik (EV) yang berkembang pesat. Di mata dunia internasional, Indonesia menyajikan hilirisasi nikel sebagai langkah strategis untuk mendukung peralihan menuju ekonomi hijau global, yang seharusnya mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan membantu memenuhi komitmen pengurangan emisi karbon global.

Namun, di balik narasi besar tersebut, kenyataan di lapangan justru menunjukkan adanya ketegangan antara janji-janji keberlanjutan yang disampaikan oleh pemerintah Indonesia dan praktik-praktik ekstraktif yang berlangsung di wilayah-wilayah pertambangan, khususnya di kawasan Weda Bay. Proyek hilirisasi nikel ini telah mengundang kritik tajam, tidak hanya karena dampak ekologis yang ditimbulkan, tetapi juga karena pengabaian terhadap keadilan sosial bagi masyarakat lokal, khususnya buruh perempuan dan komunitas adat. Dalam banyak kasus, narasi “ekonomi hijau” yang disampaikan di forum internasional sering kali berlawanan dengan kenyataan di lapangan yang lebih mengarah pada praktik *greenwashing*—sebuah strategi yang digunakan untuk menutupi kenyataan sosial-ekologis yang merugikan.

Greenwashing adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan upaya-upaya oleh negara atau perusahaan untuk menciptakan citra ramah lingkungan dengan tujuan memperoleh keuntungan politik atau ekonomi, meskipun di baliknya terdapat dampak sosial dan lingkungan yang negatif. Dalam konteks Indonesia, *greenwashing* ini tercermin dalam cara pemerintah mempresentasikan proyek hilirisasi nikel sebagai bagian dari transisi energi bersih yang “ramah lingkungan” dan “berkelanjutan” di forum internasional, seperti Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 dan berbagai pertemuan iklim global lainnya. Pemerintah Indonesia memanfaatkan isu transisi energi ini untuk menarik investasi asing, terutama dari negara-negara yang berkomitmen pada pengurangan emisi karbon dan pengembangan teknologi hijau.

Proyek tambang ini mengarah pada degradasi lingkungan yang parah, seperti deforestasi, kerusakan ekosistem, pencemaran air, dan hilangnya keanekaragaman hayati yang sangat vital bagi keseimbangan ekosistem lokal. Selain itu, praktik pertambangan yang intensif ini tidak hanya merusak alam, tetapi juga mengabaikan hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat yang paling terpengaruh oleh proyek tersebut, yaitu masyarakat lokal dan pekerja buruh perempuan. Walaupun Indonesia berhasil mengklaim bahwa hilirisasi nikel berperan dalam mendukung transisi energi hijau dengan menyediakan bahan baku untuk kendaraan listrik, kenyataannya adalah bahwa ekonomi ekstraktif tetap dominan dalam praktiknya, sementara dampak sosial dan ekologis diabaikan. Sebagai contoh, dalam forum-forum internasional, Indonesia menekankan bahwa hilirisasi nikel merupakan bagian dari komitmen negara terhadap agenda global untuk mengurangi emisi karbon dan meningkatkan penggunaan energi terbarukan. Namun, pada kenyataannya, praktik yang terjadi di lapangan menunjukkan sebaliknya. Proyek hilirisasi nikel yang dilakukan di Weda Bay tidak hanya melibatkan eksploitasi sumber daya alam yang masif, tetapi juga menyebabkan kerusakan pada habitat alami dan mengganggu kehidupan masyarakat adat yang sudah lama tinggal di kawasan tersebut. Oleh karena itu, ada ketidaksesuaian besar antara citra Indonesia sebagai pelopor ekonomi hijau dan kenyataan yang terjadi di lapangan yang jauh

lebih suram.

Dampak Sosial: Eksklusi Buruh Lokal dan Perempuan

Salah satu aspek paling mencolok dari proyek hilirisasi nikel di Indonesia adalah ketidakadilan sosial yang ditimbulkan, terutama bagi kelompok-kelompok yang paling rentan, seperti buruh lokal dan perempuan. Dalam proyek-proyek ekstraktif seperti ini, buruh lokal sering kali menjadi pihak yang paling dirugikan, baik dari segi upah maupun kondisi kerja. Pekerja tambang, yang sebagian besar merupakan buruh migran dari daerah-daerah terpinggirkan, sering kali dipaksa untuk bekerja dengan jam kerja yang panjang, tanpa perlindungan hak-hak dasar seperti upah yang layak, jaminan kesehatan, dan keselamatan kerja yang memadai.

Perempuan, khususnya, berada dalam posisi yang lebih rentan dalam industri ekstraktif ini. Selain terlibat dalam pekerjaan yang penuh risiko dan jam kerja yang panjang, perempuan sering kali bekerja di sektor-sektor informal, seperti pekerjaan domestik dan perdagangan, yang tidak diatur oleh undang-undang perlindungan tenaga kerja. Hal ini menyebabkan mereka rentan terhadap eksploitasi dan ketidakadilan, baik dari segi upah maupun kondisi kerja yang tidak aman. Di sisi lain, perempuan yang bekerja di sektor tambang juga sering kali terlibat dalam pekerjaan yang tidak dilindungi oleh peraturan ketenagakerjaan yang ada, sehingga mereka lebih rentan terhadap pelecehan, diskriminasi, dan penurunan kualitas hidup secara keseluruhan.

Dalam konteks ini, proyek hilirisasi nikel di Indonesia menunjukkan betapa eksklusif sosial—terutama terhadap buruh perempuan dan masyarakat adat—adalah salah satu isu utama yang diabaikan dalam retorika diplomasi hijau Indonesia. Sementara negara berusaha untuk mendapatkan pengakuan internasional dengan menekankan komitmennya terhadap ekonomi hijau, kenyataannya adalah bahwa kelompok-kelompok yang paling terdampak oleh proyek ini justru tidak mendapatkan perhatian yang layak. Keberlanjutan sosial dan keadilan sosial seharusnya menjadi bagian integral dari setiap kebijakan pembangunan, tetapi dalam proyek hilirisasi nikel ini, justru terpinggirkan.

Kesenjangan Antara Narasi dan Realitas: Kasus Serupa di Negara Lain

Kasus *greenwashing* dan eksklusif sosial dalam proyek hilirisasi nikel Indonesia bukanlah fenomena yang terjadi hanya di Indonesia. Negara-negara lain yang terlibat dalam proyek ekstraktif untuk memenuhi permintaan global terhadap bahan baku energi hijau juga menghadapi masalah yang serupa. Sebagai contoh, di Australia, yang merupakan salah satu produsen mineral utama dunia, proyek hilirisasi mineral yang diklaim mendukung transisi energi bersih sering kali mengabaikan dampak ekologis dan sosial yang ditimbulkan oleh praktik pertambangan. Di kawasan-kawasan yang terpinggirkan, seperti di wilayah-wilayah pedalaman Australia, komunitas adat juga sering kali menjadi korban dari praktik ekstraktif ini, yang merusak tanah adat mereka dan mengabaikan hak-hak mereka atas sumber daya alam.

Di Filipina, meskipun negara ini memiliki komitmen untuk mengurangi emisi karbon, praktik pertambangan yang intensif telah menyebabkan kerusakan ekosistem yang serius. Negara ini sering kali mengabaikan hak-hak masyarakat lokal dan pekerja perempuan dalam proyek-proyek pertambangan besar, bahkan di kawasan-kawasan yang menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat adat.

Sementara pemerintah Filipina mempromosikan kebijakan lingkungan yang lebih hijau di forum internasional, kenyataannya di lapangan sangat berbeda. Kasus-kasus serupa juga dapat ditemukan di Papua Nugini, di mana proyek ekstraktif yang dipromosikan sebagai bagian dari ekonomi hijau global telah menyebabkan kerusakan yang sangat besar terhadap ekosistem lokal dan kehidupan sosial-ekonomi masyarakat setempat.

Mekanisme Perlindungan yang Diperlukan untuk Menghindari Greenwashing

Untuk menghindari kesalahan yang sama, Indonesia perlu memperkuat mekanisme perlindungan hak asasi manusia dan memastikan bahwa kebijakan hilirisasi nikel benar-benar berkontribusi pada keberlanjutan sosial dan lingkungan. Salah satu langkah penting yang harus diambil oleh pemerintah adalah memastikan bahwa prinsip keberlanjutan sosial-ekologis terintegrasi dalam setiap proyek ekstraktif yang dilakukan di Indonesia, termasuk proyek hilirisasi nikel.

Pemerintah juga perlu memastikan bahwa masyarakat lokal, terutama komunitas adat dan buruh perempuan, dilibatkan dalam perencanaan dan implementasi proyek-proyek besar ini. Dengan melibatkan masyarakat lokal secara aktif, bukan hanya dalam aspek sosial tetapi juga dalam pengambilan keputusan terkait keberlanjutan lingkungan, Indonesia dapat memastikan bahwa proyek-proyek ekstraktif ini tidak hanya bermanfaat bagi ekonomi negara, tetapi juga adil dan berkelanjutan bagi masyarakat yang terdampak.

Diplomasi hijau Indonesia, meskipun memiliki potensi untuk memainkan peran penting dalam transisi energi hijau global, juga menghadapi tantangan besar terkait praktik *greenwashing* dan eksklusi sosial yang terjadi dalam proyek hilirisasi nikel. Hal tersebut digunakan untuk menarik investasi internasional sering kali menciptakan kesenjangan besar antara citra diplomatik yang dibangun di forum internasional dan kenyataan sosial-ekologis yang dihadapi oleh masyarakat lokal. Untuk memastikan bahwa kebijakan hilirisasi nikel Indonesia benar-benar berkontribusi pada keberlanjutan, pemerintah Indonesia harus memperkuat perlindungan hak asasi manusia dan memastikan bahwa prinsip keberlanjutan sosial-ekologis diintegrasikan dalam setiap kebijakan dan proyek ekstraktif. Keberlanjutan sosial dan lingkungan harus menjadi bagian integral dari kebijakan pembangunan Indonesia, untuk mencegah ketidakadilan dan kerusakan lebih lanjut di masa depan.

PENUTUP

Kesimpulan

Proyek hilirisasi nikel di Weda Bay mencerminkan tantangan signifikan dalam mencapai tujuan ekonomi hijau yang berkelanjutan. Meskipun Indonesia berupaya untuk tampil sebagai pemimpin dalam transisi energi global, kenyataan di lapangan menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara narasi diplomasi hijau dan dampak sosial-ekologis yang terjadi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa proyek ini telah menyebabkan eksklusi sosial yang parah, di mana perempuan dan komunitas adat terpinggirkan dari proses pengambilan keputusan dan sering kali terjebak dalam pekerjaan berupah rendah. Selain itu, praktik *greenwashing* yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia menutupi kerusakan lingkungan yang serius,

seperti pencemaran air dan deforestasi, yang mengancam kehidupan masyarakat lokal. Hal ini menciptakan kondisi yang merugikan bagi kelompok-kelompok rentan, memperburuk ketidakadilan yang sudah ada.

Untuk mencegah ketidakadilan lebih lanjut, penting bagi pemerintah Indonesia untuk memperkuat mekanisme perlindungan hak asasi manusia dan memastikan bahwa prinsip keberlanjutan sosial-ekologis diintegrasikan dalam setiap kebijakan dan proyek ekstraktif. Penelitian ini menekankan perlunya melibatkan masyarakat lokal, terutama perempuan dan komunitas adat, dalam pengambilan keputusan dan perencanaan proyek. Dengan langkah-langkah ini, Indonesia dapat memastikan bahwa proyek-proyek ekstraktif tidak hanya menguntungkan ekonomi negara, tetapi juga adil dan berkelanjutan bagi masyarakat yang terdampak. Dengan demikian, Indonesia dapat menghindari kesalahan yang sama di masa depan dan benar-benar berkontribusi pada transisi energi yang berkelanjutan dan inklusif.

DAFTAR PUSTAKA

- Amnesty International. (2020). *The human rights impact of mining activities in Indonesia*. Amnesty International.
- Bache, I., & Flinders, M. (2004). *Multi-level governance*. Oxford University Press.
- Banerjee, S. B. (2008). Corporate social responsibility: The good, the bad, and the ugly. *Critical Sociology*, 34(1), 51-79.
- Brand, U., & Wissen, M. (2021). *The imperial mode of living: Everyday life and the ecological crisis of capitalism*. Verso Books.
- Butler, S. (2020). Transnational mining and gender: The intersection of labor, environment, and greenwashing in global mining regions. *Feminist Review*, 127(3), 100-118. <https://doi.org/10.1057/s41307-020-00145-7>
- Collins, P. H. (2015). Intersectionality's deflection of oppression and domination. *Feminist Studies*, 41(3), 781-789.
- Crenshaw, K. (1991). Mapping the margins: Intersectionality, identity politics, and violence against women of color. *Stanford Law Review*, 43(6), 1241-1299.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Sage Publications.
- Death, C. (2014). Green extractivism: Sustainability and the power of capital. *Global Environmental Politics*, 14(4), 39-58.
- Dewi, D. R., Wahyudi, S., & Pradana, R. (2022). Environmental and social impacts of nickel mining in Indonesia: A case study on the Weda Bay project. *Journal of Environmental Management*, 45(3), 234-249. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2021.113102>
- Dunlap, R. E., & Jakobsen, G. (2020). Green extractivism: Capitalism and sustainability. *Environmental Politics*, 29(1), 115-134.
- Fletcher, R., & Duncan, J. (2021). Greenwashing and the global politics of sustainable development: A critical assessment. *Environmental Politics*, 30(2), 278-297. <https://doi.org/10.1080/09644016.2020.1862959>

-
- Goldman, M. (2005). *Imperial nature: The World Bank and struggles for social justice in the age of globalization*. Yale University Press.
- Gonzales, R. L., et al. (2020). Labor rights in the extractive industry: The case of mining in the Philippines. *International Labour Organization (ILO)*. Retrieved from <https://www.ilo.org/global/publications/bookstore/>
- Greenpeace. (2021). *Greenwashing in the mining industry: An environmental and social critique*. Greenpeace International.
- Greenpeace. (2021). *Greenwashing: The truth behind the global green economy*. Greenpeace International.
- Harvey, D. (2005). *A brief history of neoliberalism*. Oxford University Press.
- Harcourt, W., & Nelson, L. (2015). *Feminist political ecology: Global issues and local experiences*. Routledge.
- Harcourt, W., & Nelson, S. (2015). *Feminist political ecology: Women and the environment in the global South*. Routledge.
- Hernandez, J., et al. (2021). Indigenous rights and extractive industries: Case studies from the Amazon basin. *Human Rights Watch*. Retrieved from <https://www.hrw.org/report/2021/05/17/indigenous-rights-and-extractive-industries>
- International Institute for Environment and Development (IIED). (2021). *Greenwashing in the mining sector: The case of electric vehicle batteries*. Retrieved from <https://www.iied.org/greenwashing-mining-electric-vehicle-batteries>
- International Labour Organization (ILO). (2021). *Decent work and the mining sector: Challenges and opportunities*. International Labour Organization. Retrieved from <https://www.ilo.org/global/topics/mining/lang--en/index.htm>
- JATAM. (2023). *Green economy or green extractivism? The case of Weda Bay and the impact on local communities*. Jaringan Advokasi Tambang.
- Lee, H., & Tan, P. (2022). Environmental justice and social impacts of mining: Lessons from Indonesia. *Journal of Environmental Politics*, 31(4), 610-629. <https://doi.org/10.1080/09644016.2022.2002239>
- Lister, R. (2019). *The politics of inequality in the global South: A gendered analysis*. Cambridge University Press.
- Lima, J. R., Silva, A. T., & Alves, R. C. (2020). Sustainable mining and resource extraction in Brazil: Challenges and opportunities. *Brazilian Journal of Environmental Studies*, 41(1), 113-130. <https://doi.org/10.1590/1415-0035.2020.0567>
- Mongabay. (2023). Nickel mining in Weda Bay and the social implications for local women and indigenous communities. *Mongabay.com*.
- Nishida, M., & Kato, K. (2023). LGBTQ+ workers in extractive industries: Discrimination and social invisibility. *Gender Studies and Queer Theory Journal*, 14(2), 104-123. <https://doi.org/10.1080/24577348.2023.1862843>
- Nugroho, R. (2022). Diplomasi ekonomi hijau Indonesia: Antara pembangunan berkelanjutan dan greenwashing. *Tempo.co*.
- Paehlke, R. (2000). *Environmentalism and the global economy: The politics of sustainability*. MIT Press.

-
- Rocheleau, D., Thomas-Slayter, B., & Wangari, E. (1996). *Feminist political ecology: Global issues and local experiences*. Routledge.
- Silverman, D. (2013). *Doing qualitative research: A practical handbook*. Sage Publications.
- Sikor, T., & Sturgeon, J. (2010). The politics of sustainable development: Examining the economic and social implications of greenwashing in the global South. *Global Environmental Change*, 20(3), 567-577. <https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2010.03.008>
- Smith, A., & Procter, S. (2022). Capitalism, greenwashing, and the mining industry: Assessing the environmental and social implications of green energy initiatives in Southeast Asia. *Journal of Sustainable Development Studies*, 38(2), 44-58. <https://doi.org/10.1080/07461232.2022.2113245>
- Srivastava, A. (2020). Mining, indigenous communities, and development: A case study of resource extraction in India. *Journal of Development Studies*, 56(5), 821-839. <https://doi.org/10.1080/00220388.2019.1657274>
- United Nations. (2011). *UN Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations 'Protect, Respect and Remedy' framework*. United Nations Human Rights Council. Retrieved from <https://www.ohchr.org/en/business-and-human-rights>
- United Nations Environmental Programme (UNEP). (2021). *Greenwashing in the green economy: Implications for sustainable development*. UNEP Report. Retrieved from <https://www.unep.org/resources/report/greenwashing-green-economy>
- USGS. (2023). *Global nickel reserves and resources*. United States Geological Survey.
- Zalik, A. (2020). Electric vehicles, green mining, and the politics of “greenwashing”: A critique of global sustainability claims. *Global Environmental Politics*, 20(1), 77-97. https://doi.org/10.1162/glep_a_00528
- Zhang, Y. (2021). China’s role in Indonesia’s nickel mining industry: Environmental implications and governance challenges. *Asian Journal of Environmental Studies*, 30(4), 98-112. <https://doi.org/10.1080/15678856.2021.1881001>
- Zion, A. (2020). The green economy and environmental justice: A critical review of greenwashing practices. *Journal of Environmental Politics*, 29(3), 450-469. <https://doi.org/10.1080/09644016.2020.1752567>